



Kunci Keberhasilan Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa: Berbagi Pengalaman di Daerah

The Key to Successful Social Assistance and Direct Cash Assistance (BLT) – Dana Desa: Sharing Experiences from the Regions

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak COVID-19. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran memerlukan sinkronisasi data yang dalam praktiknya, menemui banyak tantangan, salah satunya tumpang tindih data. Katadata Forum Virtual Series bekerja sama dengan Bappenas dan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) mengadakan webinar pada 10 Juni 2020 yang berjudul "Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa: Berbagi Pengalaman dari Daerah". Webinar ini bertujuan untuk berbagi praktik baik yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Desa adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan yang menjadi dasar keberhasilan program di Indonesia karena dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Namun, ketersediaan kualitas data di desa-desa adalah tantangan utama. Bekerjasama dengan KOMPAK, pemerintah berupaya menciptakan alat yang dapat mempercepat akses dan pengarsipan data. KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan. KOMPAK dan pemerintah Indonesia telah menggunakan SID (Sistem Informasi Daerah) di 393 desa dan 7 provinsi untuk membantu menghasilkan data berkualitas yang transparan dan akuntabel. Sistem manajemen data dan informasi di desa dikelola oleh pemerintah daerah dan meliputi: data pemerintah umum,

Village Cash Direct Cash Assistance (BLT) is one of the efforts of the Government of Indonesia to mitigate the impact of COVID-19. The distribution of targeted aid was taken over by existing data in practice, receiving many challenges, one of which is data overlapping. The Katadata Virtual Series Forum in collaboration with Bappenas and KOMPAK (Community Collaboration and Services for Welfare) held a webinar on June 10, 2020 entitled "The Key to Success of Social Assistance and Direct Cash Assistance (BLT) -Dana Desa: Sharing Experiences from the Regions". This webinar aims to share good practices that have been implemented by local governments in Indonesia.

Village is the spearhead of development implementation which is the basis of successful programs in Indonesia as it reaches people living in rural areas. However, the availability of data quality in villages is a major challenge. In collaboration with KOMPAK, the government is trying to create a tool that can speed up data access and archiving. KOMPAK (Community Collaboration and Services for Welfare) is a facility funded by the Australian Government to support the Government of Indonesia in achieving poverty reduction targets and addressing inequality. KOMPAK and the Indonesian government have used SID (Regional Information Systems) in 393 villages and 7 provinces to help produce quality data that is transparent and accountable. The data and information management system in the village is managed by the local government and includes: general government data, population, finance, village development, social institutions, and village profiles. As we can see, the widespread pandemic also affected not only health but the economy, not only in cities but also in rural areas.



populasi, keuangan, pembangunan desa, lembaga sosial, dan profil desa. Seperti yang dapat kita lihat, pandemi yang meluas juga mempengaruhi tidak hanya kesehatan tetapi ekonomi, tidak hanya di kota-kota tetapi juga di daerah pedesaan. Untuk menjangkau semua penerima manfaat, pemerintah menggunakan data yang memuat jumlah penduduk berpenghasilan menengah ke bawah yang berasal dari basis data terpadu. Karena pandemi COVID-19 ini, kelompok rentan menjadi sangat terdampak. Pemerintah memainkan peran besar untuk memastikan bahwa kelompok ini tidak semakin menderita. Pandemi telah meningkatkan kebutuhan akan data karena informasinya sangat penting untuk mendaftarkan penerima manfaat, terutama dari kelompok rentan tersebut

Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa, menyampaikan pentingnya data yang kredibel. Satu data atau data yang tersinkronisasi sangat penting karena merupakan dasar pembuatan kebijakan, termasuk membuat analisis. Selain itu, Satu Data adalah kunci keberhasilan kegiatan dan digunakan di banyak lembaga, misalnya, kantor catatan sipil yang memungkinkan orang untuk memilih. Data dari catatan sipil akan menjadi dasar bagi pelayanan publik untuk warga negara Indonesia. Selanjutnya, data tersebut dapat dikembangkan dalam berbagai jenis. Misalnya, data spasial yang sedang dikembangkan dan akan diintegrasikan di tingkat desa. Data ini akan diperiksa oleh pejabat desa sehingga pejabat desa dapat melakukan identifikasi dan kategorisasi penduduk yang berhak menjadi bagian Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat untuk Keluarga Miskin (KM). PKH dapat dioperasikan menggunakan data catatan sipil,

To reach all beneficiaries, the government uses data that contains a population of middle to lower income coming from an integrated database. Because of the COVID-19 pandemic, vulnerable groups have been severely affected. The government plays a big role to ensure that this group does not suffer more. Pandemics have increased the need for data because the information is very important to register beneficiaries, especially from these vulnerable groups.

PPN Minister and Head of Bappenas, Mr. Suharso Monoarfa, conveyed the importance of credible data. A synchronised data or data is very important because it is the basis of policy making, including making analysis. In addition, One Data is the key to success and is used in many institutions, for example, the registry office that allows people to vote. Data from the civil registry will be the basis for public services for Indonesian citizens. Furthermore, the data can be developed in various types. For example, spatial data is being developed and will be integrated at the village level. This data will be examined by village officials so that village officials can identify and categorize residents who are entitled to be part of the Program Keluarga Harapan (PKH). The Program Keluarga Harapan is a conditional social assistance program for Poor Families. PKH can be operated using civil registration data, because it has a Population Registration Number (NIK). One challenge is that the system is not integrated which leads to overlapping data and is a huge burden on the national budget. Data at the village level will verify and avoid overlapping data.

Direct Cash Assistance for village funds is a breakthrough by the government in handling COVID-19. Local governments at the village, sub-district and city / district levels have a large role to play in verifying, validating and delivering information to people in rural



kesediaan darah dari dashboard data yang telah dibangun. Akses ini dapat mempercepat penyediaan golongan darah yang dibutuhkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Anwar Sanusi, mengapresiasi tim tanggap COVID-19 dan pelayanan publik dari berbagai tingkat pusat, daerah, dan juga desa. Dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial dari COVID-19 tidak bisa dipungkiri. Beliau menyampaikan pentingnya perubahan aspek regulasi yang memberikan ruang untuk dana desa hingga guna melancarkan penyaluran BLT. Pertanyaan yang muncul setelah itu merupakan bagaimana menghindari potensi data yang tumpang tindih. Menanggapi pertanyaan ini, Bapak Anwar menjelaskan mengenai pentingnya data terpadu yang akan dijadikan referensi penerima manfaat. Proses ini dinamakan pendataan dengan pendekatan bottom up approach. Begitu halnya juga pentingnya mendata penduduk miskin yang baru akibat COVID-19. Beliau juga menyetujui verifikasi yang diperlukan dan harus dimonitor oleh desa. Garis besarnya, SID akan menjadi bahan pertimbangan untuk penguatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kabupaten Bondowoso, Ibu Dewi Rahayu, menjelaskan proses sinkronisasi data di daerah dan upaya untuk Program Bondowoso Melesat meliputi pembentukan tim verval (verifikasi dan validasi) terpadu. Tim verval yang melibatkan beberapa perangkat daerah serta pendampingan di Kecamatan dan Desa meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KOMPAK dan 10 operator teknologi yang mempermudah

renewed. The embodiment of government authority in the village is very helpful in smoothing COVID-19 response assistance and strengthening the functioning of the village government.

When asked about the real role of village cadres and future plans for South Manokwari, Mr. Markus explained the requirements of the selected village cadres. Selected individuals are individuals who know almost everyone in the village. Regarding the data, village cadres have the task to collect population demographics in a village. The real example, in the case of blood transfusion, if someone is lacking blood, the village can access the blood supply data from the built-in data dashboard. This access can accelerate the supply of blood types needed.

Secretary General of the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration, Mr Anwar Sanusi, appreciated the COVID-19 response team and public services from various central, regional and village levels. The health, economic and social impacts of COVID-19 are undeniable. He conveyed the importance of changing the regulatory aspects that provide space for village funds to smooth the distribution of BLT. The question that arises after that is how to avoid the potential for overlapping data. Responding to this question, Mr. Anwar explained the importance of integrated data that will be used as a reference for beneficiaries. This process is called data collection with the bottom up approach. Likewise the importance of recording new poor population due to COVID-19. He also approved the verification needed and had to be monitored by the village. In summary, SID will be considered for strengthening the village and empowering the village community.

The Head of Socio-Cultural Affairs, Bappeda of



kesediaan darah dari dashboard data yang telah dibangun. Akses ini dapat mempercepat penyediaan golongan darah yang dibutuhkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Anwar Sanusi, mengapresiasi tim tanggap COVID-19 dan pelayanan publik dari berbagai tingkat pusat, daerah, dan juga desa. Dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial dari COVID-19 tidak bisa dipungkiri. Beliau menyampaikan pentingnya perubahan aspek regulasi yang memberikan ruang untuk dana desa hingga guna melancarkan penyaluran BLT. Pertanyaan yang muncul setelah itu merupakan bagaimana menghindari potensi data yang tumpang tindih. Menanggapi pertanyaan ini, Bapak Anwar menjelaskan mengenai pentingnya data terpadu yang akan dijadikan referensi penerima manfaat. Proses ini dinamakan pendataan dengan pendekatan bottom up approach. Begitu halnya juga pentingnya mendata penduduk miskin yang baru akibat COVID-19. Beliau juga menyetujui verifikasi yang diperlukan dan harus dimonitor oleh desa. Garis besarnya, SID akan menjadi bahan pertimbangan untuk penguatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kabupaten Bondowoso, Ibu Dewi Rahayu, menjelaskan proses sinkronisasi data di daerah dan upaya untuk Program Bondowoso Melesat meliputi pembentukan tim verval (verifikasi dan validasi) terpadu. Tim verval yang melibatkan beberapa perangkat daerah serta pendampingan di Kecamatan dan Desa meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KOMPAK dan 10 operator teknologi yang mempermudah pelaksanaan verval data. Latar belakang inisiatif ini merupakan kebijakan pusat dari Kementerian Sosial yang terkait dengan kebijakan menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena banyaknya penduduk diluar data, tim verval terpadu dibentuk untuk melakukan pembersihan data DTKS.

The Head of Socio-Cultural Affairs, Bappeda of Bondowoso Regency, Ms. Dewi Rahayu, explained the process of synchronising data in the regions and efforts for the Bondowoso Melesat Program include the formation of an integrated verval (verification and validation) team. The verval team which involved several regional instruments and assistance in the Districts and Villages included the Transportation Agency, the Health Agency, the Social Service Agency, the Regional Development Planning Agency, KOMPAK and 10 technology operators that facilitated the implementation of the data verval. The background of this initiative is the central policy of the Ministry of Social Affairs which is related to the policy of deactivating participants of Contribution Beneficiaries (PBI) outside the Integrated Social Welfare Data (DTKS). Due to the large number of people